

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Isra, Saldi. 2014. *Pemilihan Umum Serentak*. Jakarta: Rajawali Pers.

Isra, Saldi. 2017. *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*. Jakarta: Themis Books.

Fahmi, Khairul. 2012. *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Gaffar, M. Janedjri. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.

Ashidiqie, Jimly. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Budiarjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Garamedia Pustaka.

Seran, Gotfridus Goris. 2013. *Kamus Pemilu Populer: Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sunggono, Bambang. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Harun, Refly. 2016. *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Nanti*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sasmito, Joko. 2018. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press.

Sukarja, Ahmad. 2012. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marpaung, Lintje Anna. 2018. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Andi.

Huda, Ni'matul. 2007. *Lembaga Negara Dalam Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan (1): (Jenis, Fungsi dan Muatan)*. Yogyakarta: Kanisius.

### 2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah diubah ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, lalu ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

### 3. Putusan Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Putusan Pendahuluan Nomor 002/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/V/2018.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Putusan Pendahuluan Nomor 006/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/XII/2018.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Putusan Pendahuluan Nomor 005/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/XI/2018.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Putusan Pendahuluan Nomor 001/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/V/2018.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Putusan Pendahuluan Nomor 003/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/VII/2018.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Putusan Nomor 009/PS.REG/03.00/IX/2018 terkait penyelesaian sengketa proses pemilu Partai Gerakan Perubahan Indonesia Provinsi Sumatera Barat.

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Putusan Nomor 01/PS>REG/BAWASLU-PROV. SB.03.15/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan.

Bawaslu Kota Padang, Putusan Nomor 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.01/ VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu antara DPD Partai Berkarya Kota Padang dengan KPU Kota Padang.

Bawaslu Kota Sawahlunto, Putusan Bawaslu Kota Sawahlunto dalam penyelesaian sengketa proses pemilu antara DPC Partai Demokrat dengan KPU Kota Sawahlunto, tanggal 11 Oktober 2018.

Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, Putusan Nomor 001/PS.REG/BAWASLU-PROV. SB.03.09/VIII/2018 terkait penyelesaian sengketa proses pemilu DPD Partai Nasdem Kabupaten Dharmasraya, tanggal 31 Agustus 2018.

Bawaslu Kabupaten Agam, Putusan Nomor 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/ VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu Partai Berkarya, tanggal 31 Agustus 2018.

Bawaslu Kabupaten Sijunjung, Putusan Nomor 01/PS.REG/BAWASLU-PROV. SB.03.16/VIII/2018 terkait penyelesaian sengketa proses pemilu DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI), tanggal 29 Agustus 2018.

#### 4. Jurnal

- Ahmad Rizqi Robbani Kaban. 2019. Kekuatan Mengikat Putusan Adjudikasi Bawaslu Dalam Sengketa Proses Pemilu 2019. Jurnal Hukum Adigama.
- Rubian Ariviani dan Hasyim Asy'ari. 2016. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Berkaitan Dengan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia, Jurnal Hukum Diponegoro.
- Khairul Fahmi dkk. 2020. Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu 2019 di Sumatera Barat, Jurnal Konstitusi.
- Hendra Nurtjahyo. 2005. Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independent (*State Auxiliary Agencies*) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara: Jurnal Hukum dan Pembangunan.
- Muh. Risnain. 2014. Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Jurnal Hukum dan Peradilan.

#### 5. Internet

- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem>
- <https://bawaslu.go.id/id/berita/upaya-cepat-bawaslu-dalam-penyelesaian-sengketa-proses-pemilu>
- <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-adjudikasi.html>
- <https://seputarilmu.com/2019/11/adjudikasi.html>

#### 6. Skripsi

- Marlis, Bin Riki. 2011. *“Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat periode 2010-2015”*. Skripsi. Ilmu Hukum. Universitas Andalas, Padang.
- Agung, 2019. *“mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2019)”*. Skripsi. Ilmu Hukum. Universitas Andalas, Padang.
- Ridho, Muhammad Rasyid. 2018. *“Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Republik Indonesia Pada Tahun 2018”*. Skripsi. Ilmu Hukum. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

#### 7. Majalah

- Ana, Nur Rosihan. 2019. *Menapak Jejak Pemilu*. Pemilu Serentak. Konstitusi. Edisi Nomor 145. Jakarta